

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ARAB SAUDI ATAS PEJABAT
DIPLOMATIKNYA DI JERMAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GHEA PISCA RESKATI
NIM. 0910110035



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

TANGGUNG JAWAB NEGARA ARAB SAUDI ATAS PEJABAT DIPLOMATIKNYA DI JERMAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA

Ghea Pisca Reskati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: arenahukum@ub.ac.id

ABSTRAKSI

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya Di Jerman Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya seorang pejabat diplomatik asal Arab Saudi yang melakukan pelanggaran HAM dan tindak pidana penganiayaan di negara penerima (Jerman), sementara ia memiliki hak kekebalan dan keistimewaan dari yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi dari negara penerima. Korbannya seorang TKW asal Indonesia yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga keluarga diplomat tersebut. Kejadian berlangsung diluar negara tersangka maupun korban. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab negara Arab Saudi atas pejabat diplomatiknya yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima (dalam kasus ini di Negara Jerman)? (2) Bagaimana upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di Jerman? Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, deklarasi internasional, statuta internasional, perjanjian internasional, pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan Pasal 9, 32 dan 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961, Jerman dapat melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik asal Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran hukum di negaranya. Sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi wajib bertanggung jawab terhadap negara penerima dengan jalan menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan lalu memanggil pulang pejabat diplomatik yang bersangkutan, kemudian menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Arab Saudi. Disamping itu upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKW Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di Jerman adalah dengan melakukan negosiasi yang diwakilkan diplomat RI/Atase Ketenagakerjaan dengan Pihak Pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan Pemerintah Jerman sebagai pihak

ketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Hal lain Pemerintah Indonesia dapat meminta TKW Indonesia yang menjadi korban untuk melayangkan gugatan yang ditujukan kepada majikan TKW tersebut agar diadili di Pengadilan Umum Riyadh yang selanjutnya dijatuhi sanksi sesuai aturan hukum negara Arab Saudi.

Kata Kunci: Tanggung jawab negara, pejabat diplomatik, tindak pidana, TKI.

ABSTRACT

In this thesis, the author raised the issue of Saudi Arabia's State Responsibility For Doing Diplomatic Officials Crime Against Indonesian Women Workers in Germany. The selection of this themes due to the act of committed human rights violations and criminal torture at the receiving state (Germany) by official diplomatic from Saudi Arabia, while he has immunity and privileges from criminal jurisdiction, civil and administration of receiving state. The victim was a migrant worker from Indonesia who works as housemaids at diplomat's family. The incident took place from the outside of both the suspect and victim state. Therefore, this research formulated problems i.e. (1) How does Saudi Arabia Government takes responsibility for diplomatic officials who violated the law at receiving state (in this case at Germany)? (2) How does the Indonesian's Government legal efforts provides legal protection for Indonesian's Labor Women (TKW) who became victims of crime in Germany? This research used a kind of normative research, with statute approach and case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the authors will be analyzed using descriptive analysis techniques to determine how the content or meaning of the rule of law from international conventions, declarations, international statutes, international treaties, opinions of international law expert, which is used as a reference to solve the legal issues that become the object of study. The authors obtained the answers of the problem based on Article 9, 32, and 41 paragraph (1) of Vienna Convention in 1961, Germany can give persona non grata to diplomatic officials from Saudi Arabia who did lawlessness in Germany. As a sending state, the Saudi Arabian Government shall take responsibility for receiving state to renounce the rights and privileges of immunity, recalled diplomatic officials concerned, then impose appropriate sanction that occurred in Saudi Arabia. Beside that, Indonesian Government make an negotiation effort represented by Indonesian Diplomat/Labor Attache with Saudi Arabian Government in terms of providing legal protection for Indonesian migrant workers who became victims in Germany to resolve the case. If the Government of Saudi Arabia refused to negotiate, Indonesian Government can ask Germany Government for help as a third party that can help to solve the case. In addition, Indonesian Government may ask Indonesian migrant workers who became victims to submit a lawsuit aimed at employers of migrant worker to stand trial in Riyadh General Court which subsequently sanctioned by the rules of Saudi Arabia law.

Keywords: State responsibility, diplomatic officials, criminal act, migrant workers.

PENDAHULUAN

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibukota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalah pahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa.¹

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim pada negara penerima.²

Wakil diplomatik dikirim dengan membawa misi-misi diplomatik di suatu negara. Misi diplomatik ini merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Mereka diberikan jaminan-jaminan untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya dalam bentuk kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa.

Pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Sebagai wakil dari negaranya maka wajib bagi pejabat diplomatik untuk selalu menjaga nama baiknya dan negaranya dan tidak hanya berlindung pada atribut yang memberikan kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang wakil diplomatik. Terlebih disaat melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dan melanggar hukum nasional di negara

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hal 510.

² Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal 38.

penerima. Apabila hal demikian terjadi, maka negara penerima dapat memberikan sanksi dan negara pengirim wajib bertanggung jawab sepenuhnya.

Berkenaan dengan kegiatan yang bertetangan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, maka baru-baru ini yang terjadi adalah adanya kasus yang terjadi pada tahun 2010 yang menimpa tenaga kerja wanita Indonesia yakni Dewi Ratnasari.³ Dewi bekerja kepada keluarga diplomat mulai April 2009 di Arab Saudi, selanjutnya Dewi beserta keluarga diplomat itu pindah karena pejabat diplomatik itu ditugaskan ke Jerman. Dewi menandatangani perjanjian kerja yang mengatur upah minimal pembantu rumah tangga bagi diplomat di Jerman sebesar 750 Euro sebulan untuk 40 jam kerja perminggu, sekitar 6 jam perhari, dan cuti tahunan selama satu bulan.⁴

Sejak itu Dewi menjalani hari-harinya seperti di neraka. Ia diharuskan bekerja 7 hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam. Kabarnya gaji Dewi juga tidak dibayar. Paspor Dewi juga ditahan oleh majikannya. Ia tidak dibekali pakaian hangat. Satu-satunya pemberian yang pernah dia terima adalah hadiah hari raya lalu sebesar 150 Euro. Dewi juga sering terima siksaan berupa pukulan dengan tongkat atau dengan tangan dan dilarang keluar rumah. Terakhir dia dilempar dengan botol parfum yang melukai kepalanya. Pada bulan Oktober tahun 2010 ia melarikan diri dan mencari bantuan dari Ban Ying, sebuah asosiasi yang berbasis HAM di Berlin yang membantu perempuan migran dari Asia Tenggara.

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya Di Jerman Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Jerman”.

³ Pada sumber yang telah diperoleh, nama Dewi Ratnasari ialah bukan nama yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan pihak yang bersangkutan tidak mengizinkan namanya dipublikasikan.

⁴ Sasmini, *Case Study HI Kekebalan Diplomatik (online)*, <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id>, (20 Oktober 2012)

MASALAH

Permasalahan yang akan diteliti adalah tanggung jawab negara Arab Saudi atas pejabat diplomatiknya yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima (dalam kasus ini di Negara Jerman) dan upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di Jerman.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu norma ataupun kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku ilmu hukum, hukum internasional, hukum diplomatik, hukum ketenagakerjaan, pendapat para pakar hukum internasional, jurnal hukum, dan internet, dan sumber bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Inggris. Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Pemerintah Arab Saudi selaku negara pengirim diplomatiknya wajib bertanggungjawab pada negara penerima. Hal tersebut dikarenakan negara Arab Saudi memenuhi unsur-unsur timbulnya pertanggungjawaban negara, dimana tindakan organ negara dalam kapasitas resmi jabatannya (dalam hal ini pejabat diplomatik asal Arab Saudi) telah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum nasional dan internasional yakni yang tertuang dalam Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, pejabat diplomatik asal Arab Saudi itu telah melanggar pasal-pasal yang berisi pemenuhan hak yang dimiliki dan wajib diberikan kepada buruh migran (termasuk tenaga kerja wanita asal Indonesia). Pasal-pasal itu antara lain:

- a. Pasal 10, yang berbunyi “Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya akan mengalami penyiksaan atau kekejaman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman”. Kaitanya pasal ini dengan kasus penganiayaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat diplomatik asal Arab Saudi terhadap TKW Indonesia di Jerman ialah, TKW tersebut mendapat siksaan berupa pukulan dengan tangan maupun tongkat oleh majikannya yang merupakan seorang pejabat diplomatik asal Arab Saudi, TKW itu dilempar botol parfum yang melukai kepalanya, selain itu ia hanya tidur dilantai beralas kasur tipis dan tidak bekal pakaian hangat. Kejadian itu berlangsung di Jerman, negara dimana pejabat diplomatik itu ditugaskan.
- b. Pasal 11 Ayat (1), yang berbunyi “Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya akan diperbudakan atau diperhambakan”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan bekerja penuh tujuh hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam, gajinya pun tidak dibayarkan, hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat. Dimana dalam kontrak kerja dituliskan bahwa TKW itu hanya diwajibkan bekerja selama 40 jam dalam seminggu dan mendapat upah 750 Euro perbulan.
- c. Pasal 21 yang berbunyi: “Adalah melanggar hukum bagi siapa pun, selain seorang pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, untuk menyita, menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi ijin masuk atau tinggal, tempat tinggal atau pembentukan dalam wilayah nasional atau ijin kerja. Dalam hal apapun tidak diizinkan untuk menghancurkan paspor atau dokumen setara dari buruh migran dan anggota keluarganya”. Pada kasus diatas TKW tersebut paspornya disita majikannya dimana majikannya itu tidak memiliki wewenang untuk menyita paspor tersebut.
- d. Pasal 25 Ayat (1) bagian (a), yang berbunyi “Buruh migran tidak harus menerima perlakuan yang kurang menguntungkan dari negara tempatnya bekerja dalam hal remunerasi dan kondisi lain dari pekerjaan, yang mengatakan, lembur, jam kerja, istirahat mingguan,

liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja dan kondisi kerja yang lain, menurut hukum dan praktek nasional, yang dicakup dalam istilah ini”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan bekerja penuh tujuh hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam, gajinya pun tidak dibayarkan.

Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM oleh pejabat diplomatik berupa pemukulan, pelemparan dengan botol parfum, membiarkan tidur di lantai, tidak memberikan pakaian hangat, memforsir jam kerja TKW dalam sehari-harinya, tidak membolehkan TKW itu keluar rumah dan tidak membayarkan gaji yang harusnya diterima oleh TKW juga merupakan pelanggaran atas Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”. Artinya, tidak ada yang harus dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusawi atau merendahkan atau hukuman.

Perlakuan tidak manusiawi diatas juga melanggar Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* , yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*”. Artinya, Tidak ada yang dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman . Di waktu tertentu, tidak ada yang akan dikenakan tanpa persetujuan bebas untuk eksperimen medis atau ilmiah.

Sementara dari perlindungan TKI/TKW Indonesia yang tertuang di *The Basic Law of Government of Saudi Arabia 1992*, diatur secara jelas pada Pasal 18 yang menetapkan bahwa negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggu gugatnya kepemilikan pribadi tidak akan disita, kecuali untuk kepentingan umum dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar. Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan pejabat diplomatik atau sebagai majikan yang menyita paspor milik TKW itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang telah dilakukannya.

Apabila kasus tersebut dikaitkan dengan aturan yang berlaku di Indonesia maka pejabat diplomatik yang bersangkutan telah melanggar Pasal 352 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penganiayaan ringan. Bahwa menganiaya adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja membuat orang lain luka-luka atau menimbulkan rasa sakit. Pada kasus diatas TKW itu mengalami tindakan pemukulan menggunakan tangan, tongkat, dan melempar botol oleh pejabat diplomatik itu dan melukai kepala TKW asal Indonesia tersebut.

Tidak hanya itu, pejabat diplomatik tersebut melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya:

- a. Pasal 55, yang mengatur bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara TKW dan majikannya itu tidak dapat diubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan para pihaknya. Pada kenyataan yang terjadi TKW itu diharuskan bekerja tidak sesuai dengan waktu yang disepakati antara keduanya dan gaji TKW pun tidak dibayarkan.
- b. Pasal 79, yang mengatur bahwa majikan TKW itu wajib memberikan waktu istirahat kepada TKW nya.
- c. Pasal 86, yang mengatur bahwa setiap TKW itu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dengan adanya hal-hal diatas pejabat diplomatik itu telah gagal dalam melaksanakan fungsi misi diplomatiknya di negara penerima, untuk itu ia juga telah melanggar Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang disebutkan bahwa wakil diplomatik diharapkan untuk menghormati dan memperhatikan undang-undang dan peraturan hukum negara penerima. Hal-hal demikian berimplikasi pada pemberian sanksi terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan.

Sesuai Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pemerintah Jerman dapat melakukan *persona non grata* bagi pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negaranya. Selanjutnya sesuai Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, kewajiban Pemerintah Arab Saudi untuk mempertanggungjawabkan tindakan pejabat diplomatiknya adalah

dengan menanggalkan kekebalan dan memanggil pulang pejabat diplomatiknya lalu mengadili serta mengenakan sanksi sesuai hukum nasional Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab pada Pemerintah Indonesia yakni dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.

Disisi lain Pemerintah Indonesia juga harus berupaya dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi TKW Indonesia yang menjadi korban penganiayaan dan pelanggaran HAM di Jerman. Hal demikian didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketika masalah Dewi mencuat, Dubes segera mengutus staf untuk memberikan bantuan kekonsuleran, terutama agar hak-hak dasar Dewi dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangannya bisa diperoleh. Staf KBRI antara lain telah bertemu dengan organisasi Ban Ying dan telah mengadakan kontak dengan para pengacara Dewi. "Staf KBRI juga telah bertemu dengan pejabat konsuler Kedubes Arab Saudi di Berlin. Kunjungan tersebut terkait proses pengadilan Dewi Ratnasari dan meminta kerjasama Kedubes Arab Saudi untuk menuntaskan kasus tersebut dengan baik," jelas Dubes.⁵

Upaya hukum yang seharusnya dilakukan Pemerintah Indonesia adalah memberikan bantuan hukum yang dapat diwakilkan pada Diplomat Indonesia khususnya Atase Ketenagakerjaan KBRI di Jerman. Melalui diplomatnya/Atase Ketenagakerjaan dapat melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan membawa pejabat diplomatik yang melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM itu ke dalam pengadilan Arab

⁵ Eddi Santosa, *Ada TKI Disiksa Keluarga Diplomat Arab Saudi di Berlin* (online), <http://detiknews.com>, (20 Oktober 2012)

Saudi. Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan terhadap Pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini.

Pemerintah Indonesia juga dapat mengupayakan perlindungan hukum dengan meminta Dewi Ratnasari untuk melayangkan gugatan yang ditujukan kepada mantan majikannya tersebut. Selanjutnya gugatan itu diserahkan pada Pengadilan Umum Riyadh sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki kompetensinya dalam upaya penyelesaian kasus pidana yang melibatkan warga negara Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga sebaiknya segera membangun Memorandum of Understanding (MoU) yang menjamin hak-hak buruh migran asal Indonesia. Dengan adanya perlindungan dan pendampingan hukum yang maksimal ini nantinya diharapkan tidak ada lagi kejadian buruk yang menimpa warga negara Indonesia sebagai TKI di luar negeri.

PENUTUP

1. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :
 - a. Bahwa berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Arab Saudi merupakan negara pengirim yang mengirimkan wakil diplomatiknya di negara penerima yakni Jerman.
 - b. Bahwa sesuai Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pemerintah Jerman dapat melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik asal Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran hukum di negaranya.
 - c. Bahwa menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi wajib bertanggung jawab terhadap negara penerima yakni dengan menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan lalu memanggil pulang pejabat diplomatik yang bersangkutan kemudian menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Arab Saudi.

2. Sesuai UUD RI 1945, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya perlindungan hukum bagi TKW Indonesia yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran HAM oleh seorang pejabat diplomatik asal Arab Saudi di Jerman dengan melakukan negosiasi yang antara diplomat RI/Atase Ketenagakerjaan dan Pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan Pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Pemerintah Indonesia dapat meminta Dewi Ratnasari untuk melayangkan gugatan yang ditujukan kepada mantan majikannya untuk diadili di Pengadilan Umum Riyadh yang selanjutnya dijatuhi sanksi sesuai aturan hukum negara Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga sebaiknya membentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan menjamin hak-hak buruh migran asal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Martin, Elizabeth (Ed.), *A Dictionary of Law*, Oxford University, New York, 2002.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Agusmidah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Bambang Purnomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, 1985.
- Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2011.

- Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary 9th ed*, West Publishing Co, USA, 2009.
- C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Coplin, William D, **Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis**, terjemahan Mercedes Marbun, Sinar Baru, Bandung, 1992.
- E. Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, Edited by Sir Meville, Longmans Green & Co, 4th ed, London, 1957.
- FX. Adji Samekto, **Negara Dalam Dimensi Hukum internasional**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Henkin, Pugh, Schachter, and Smit, *International Law; Cases and Materials*, 2n, edn, 1987.
- Johni Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- L. Dembinski, *The Modern Law of Diplomacy*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1988.
- M.M Wallace, Rebecca, *International Law, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell, London, 2002.
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law Vol. 1 8th Ed*, Longman Green & Co, New York, 1960.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R.C. Hingorani, *Modern International Law*, Oceana Publications, New York, 1984.
- Romli Atmasasmita, **Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana**, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Shaw, Malcolm N, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977.
- Soedarto, **Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional Vol. 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional Vol. 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sumaryo Suryokusumo, **Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus**, PT Alumni, Jakarta, 1995.
- Syahmin AK, **Hukum Diplomatik Suatu Pengantar**, Amico, Bandung, 1998.
- T. May Rudy, **Hukum Internasional Vol. 2**, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- W.J.S Poerwodarminto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zainal Asikin, **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Jurnal:

Official Records, *U.N. Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities*, Vienna, 2 Maret-14 April 1961, Vol. 1, U.N. Publication, 1961.

T. Soelaiman, **Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri**, jurnal hukum dan pembangunan, juli-september Vol.32. No. 3, Jakarta, 2002.

Tamara Geerards, **Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi Dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi**, 9 May 2011, Vol. 21, No. 4:361-370, Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-undang:

Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1920

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990

Universal Declaration of Human Rights 1948

Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

The Basic Law of Government of Saudi Arabia 1992

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

Royal Decree Nomor/M/21 tanggal 15 November 1969 mengenai Undang-Undang Perburuhan Kerajaan Arab Saudi

Rules Of Implementation for The Control And Regulation of Labor Inspection Activies 1970

Saudi Labour Law 2005

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasn migrasi Republik Indonesia Nomor Kep-104 A/MEN/2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi/Thesis/Disertasi:

Tita Merisa Rahmawati, **Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Ke Luar Negeri**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010.

- Uti Ilmu Royen, **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atau Buruh Outsourcing**, Thesis tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009.
- Philips M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat**, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya, Universitas Airlangga, 1987.

Koran:

- Erlangga Djumena, **Wapres: Pemerintah Tidak Bisa Tunda Pengiriman TKI**, Kompas, 22 Oktober 2003.

Internet:

- Eddi Santosa, **Ada TKI Disiksa Keluarga Diplomat Arab Saudi di Berlin** (*online*), <http://detiknews.com>, (20 Oktober 2012)
- Egidius Patnistik, **Penyiksa TKW Lolos karena Imunitas Diplomatik** (*online*), <http://kompas.com>, (20 Oktober 2012)
- Hans Kundnani, **Germany's Contribution to the Arab Spring** (*online*), <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/09/germany-arms-sale-saudi-arabia>, (8 April 2013)
- NN, **Dewi Ratnasari Tuntut Majikan Diplomat Saudi di Berlin. Sayang Terganjil Kekebalan Diplomatik** (*online*), <http://tvOneNews.com>, (20 Oktober 2012)
- NN, **Germany - United Arab Saudi** (*online*) http://en.wikipedia.org/wiki/Germany%E2%80%93United_Arab_Emirates_relations, (8 April 2013)
- NN, **Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh** (*online*), <http://kemlu.go.id/riyadh>, (31 Maret 2013)
- NN, **Momentum 60 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Jerman** (*online*), http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6018&Itemid=29, (31 Maret 2013)
- NN, **Profil Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin** (*online*), <http://www.kemlu.go.id/berlin/Pages/AboutUs.aspx?IDP=5&l=id>, (31 Maret 2013)
- Pelapor Khusus Roman Anatolevich Kolodkin, **Pendahuluan Laporan Imunitas Pejabat Negara Dari Yurisdiksi Pidana Asing** (*online*), A/CN.4/601, hal 27, <http://un.org/en>, (16 April 2013)
- Saudi Embassy, **Labor and Workmen Law of The Kingdom of Saudi Arabia** (*online*), www.saudiembassy.net/LaborLaw69-1of4.asp.htm, (16 April 2013)
- Sasmini, **Case Study HI Kekebalan Diplomatik** (*online*), <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id>, (20 Oktober 2012)